

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran Daerah, sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi relevan dan penting bagi pemerintah Daerah. APBD seharusnya dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan dicapainya tujuan Daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja suatu pemerintah Daerah (Rahman, dkk. 2022).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA SKPD). Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai.

Menurut UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 32 yang dinyatakan bahwa "Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda" (K, 2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh

dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit atau surplus APBD. Pada kenyataannya, di dalam dokumen APBD seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh Pemda yaitu penyertaan modal (Investasi Daerah) dan pembayaran pokok utang (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2017).

Menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting bagi lembaga pemerintah karena bertujuan untuk menilai efektivitas sistem dan prosedur yang diterapkan serta memudahkan proses pengeluaran kas. Pengendalian internal terhadap pengeluaran kas belanja langsung adalah metode yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membimbing anggota organisasinya dalam bidang keuangan. Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang paling sering digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran, salah satunya digunakan untuk

belanja langsung, dimana hal tersebut memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Belanja Langsung (LS) adalah jenis pengeluaran yang dilakukan oleh satuan kerja, dimana dana langsung ditransfer dari rekening kas daerah/negara ke pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditentukan (Rawung, dkk, 2023)

1.2. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan Tugas Akhir adalah "Bagaimana Prosedur Pengeluaran Kas dan Anggaran Belanja Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta?". Secara rinci rumusan masalah Tugas Akhir dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY?
2. Bagian dan pihak mana saja yang terkait dalam proses pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Dokumen apa saja yang terkait dalam proses pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan penulisan Tugas Akhir mengenai prosedur Pengeluaran Kas dan Anggaran Belanja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

1. Mengetahui prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
2. Bagian dan pihak mana saja yang terkait dalam proses pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
3. Dokumen dan laporan apa saja yang terkait dalam proses pengeluaran kas dan anggaran Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

1.4. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tugas akhir untuk periode selanjutnya khususnya tentang prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja, dan menjadi alat ukur kelulusan telah menyelesaikan Tugas Akhir.

2. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penulis lain yang mengambil topik penelitian yang sama.

3. Bagi Penulis

Manfaat tugas Akhir penulis yaitu menjadi pemenuhan syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Diploma III Politeknik YKPN Yogyakarta, menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang akuntansi terutama tentang prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja dan mendapatkan pemahaman serta pengalaman mengenai dunia kerja dan mengaplikasikan teori yang didapat sehingga dapat menjadi bekal dalam dunia kerja nantinya.